

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI TIMUR TENGAH

Hubungan Indonesia dengan negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah memiliki sejarah yang panjang bahkan ada sebelum Indonesia merdeka. Hingga saat ini hubungan masih tetap terjaga dan semakin berkembang. Banyak faktor yang menjadi latar belakang memperkuat hal ini seperti kepentingan dalam negeri, luar negeri, ekonomi, hingga agama.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia tentunya memiliki kedekatan yang lebih terhadap kawasan tempat kelahiran Islam tersebut. Selain itu dikawasan tersebut juga terdapat cadangan minyak terbesar di dunia. Minyak merupakan bahan energi yang paling banyak dipakai terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan banyaknya populasi tersebut tentunya juga akan semakin banyak konsumsi. Untuk lebih memahami bagaimana hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah bisa terjalin maka pada bab ini akan dijelaskan tentang politik luar negeri Indonesia.

A. Politik Luar Negeri Indonesia

Pengertian politik luar negeri (*foreign policy*) secara umum ialah kebijakan suatu negara terhadap negara-negara lain di dunia internasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Menurut para pakar hubungan internasional, misalnya, politik luar negeri suatu negara sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor: kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta lingkungan internasionalnya. Harold dan Margaret Sprout menguraikan bahwa politik luar negeri sebagai skema atau pola dari cara dan

tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu *vis-à-vis* negara lain atau kelompok negara lain. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai "suatu kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional". Dengan begitu politik luar negeri menjadi cerminan bagi kepentingan nasional negaranya

Dalam buku Drs. D. Sumpena Prawirasaputra yang berjudul Politik Luar Negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa pengertian luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan disebut kepentingan nasional. Pada hakekatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respons terhadap lingkungan ekologisnya.⁹ Kemudian Leo Suryadinata menyebutkan adanya tiga faktor yang menentukan politik luar negeri: kapabilitas negara, persepsi para elite politik nasional tentang masalah-masalah internasional, serta dominasi budaya dan lembaga-lembaga politik di negara yang bersangkutan.

Terbentuknya politik luar negeri Indonesia berawal mulai dari proses saat Indonesia berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dalam melawan penjajahan dari pihak asing tentu diperlukannya kekuatan senjata untuk memperoleh kemerdekaan, namun saat itu para pemimpin negara beranggapan bahwa hal itu saja tidak akan cukup dalam melawan persenjataan dan kekuatan musuh yang lebih baik.

⁹ Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Jalur diplomasi dianggap lebih baik dan mampu mewujudkan kemerdekaan.

Ketika roda pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soekarno yang saat itu menjadi suara politik Indonesia. Dalam periode Soekarno politik luar negeri Indonesia diwarnai sikap anti imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia juga menjadi lebih militan, dikarenakan saat itu Indonesia menentang keras adanya nekolim, yakni imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Kekuatan politik yang dominan, proses pembuatan politik luar negeri bagaikan pembuatan keputusan mutlak, yaitu Soekarno sebagai penentu kata akhir sedangkan elite di lingkungan istana bersaing untuk mempengaruhi presiden dalam penyusunan kebijaksanaan luar negeri tersebut. Dalam menangani perselisihan internasional Soekarno menggunakan cara desakan yang kuat dan penuh semarak, tetapi tidak mengabaikan penggunaan diplomasi dan mediasi pihak ketiga.

Orde Baru merupakan awal dari kepemimpinan Soeharto, pada kepemimpinan Presiden Soeharto politik luar negeri Indonesia berpedoman pada dua dasar pokok: 1. Kepentingan nasional yang diperhitungkan secara realistis, dan 2 kenyataan yang terdapat dalam dunia internasional agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan revolusi Indonesia dalam menciptakan dunia dan tata masyarakat bangsa-bangsa yang baru.

Pada periode ini Soeharto lebih memfokuskan kebijakan yang dibuatnya pada pembangunan sektor ekonomi. Hal itu dimulai dari pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan untuk merehabilitasi dan menstabilisasi keadaan dalam negara, dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Kabinet Pembangunan dengan tugas Panca Krida-nya. Setelah itu rencana pembangunan negara dimulai dengan Trilogi Pembangunan yang memiliki tiga unsur yaitu (1) pemerataan,

(2) pertumbuhan dan (3) stabilitas nasional. Karena, dengan pemerataan akan dapat dicapai negara yang adil, dengan pertumbuhan dapat dicapai negara yang makmur, yang mana point tersebut merupakan cita-cita yang terlampir dalam Pembukaan UUD 1945.

Dasar-dasar pokok dari politik luar negeri Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama menyatakan, "...kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Kemudian pada Mukadimah UUD 1945 dalam ayat ke-4 berbunyi bahwa: "... Pemerintah / negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".¹⁰

Dalam setiap butir-butir Pancasila juga menjadi landasan bagi politik luar negeri itu sendiri. Pada butir kedua Pancasila disebutkan bahwa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Indonesia mengakui bahwa manusia mempunyai martabat yang sama. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia menghindari penindasan terhadap negara lain dan menolak negara lain yang akan menjajah bangsa Indonesia. Kemudian pada butir keempat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Berdasarkan hal ini, segala kebijakan politik luar negeri Indonesia dihasilkan dari musyawarah lembaga-lembaga yang terkait atas aspirasi rakyat Indonesia. Jika terjadi permasalahan tentang politik luar negeri Indonesia, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah sesuai dengan prinsip Pancasila.

¹⁰ Michael Leifer, *"Politik Luar Negeri Indonesia"*, 1983, Jakarta.

Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijakan Politik Luar Negeri RI dalam Pasal 4 mencantumkan perjuangannya yang didasarkan atas 4 ketentuan sebagai berikut:¹¹

1. Dasasila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Afrika dan Asia, perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta mengandung sifat nonintervensi;
2. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri secara Asia, dan kerja sama regional;
3. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara/bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan Revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian sesuai dengan falsafah Pancasila;
4. Pelaksanaan dilakukan secara keluwesan dalam pendekatan dan pengankapan, sehingga pengarahannya harus untuk kepentingan nasional terutama peng-ambegparamarta-an kepentingan ekonomi rakyat.

Dengan menggunakan dasar landasan dan pedoman yang kuat, arah dan tujuan politik luar negeri tidak bisa menyimpang dari dasar-dasar yang telah ada. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan juga dalam Mukadimah UUD 1945 tersebut mencerminkan cita-cita atau ide bangsa Indonesia saat memproklamasikan kemerdekaanya.

¹¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XII/MPRS/1966 tentang *Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia*

Sehingga dua dasar ini menjadi landasan ideal bagi politik luar negeri Indonesia.

Setiap negara melahirkan politik luar negeri yang berbeda-beda karena banyak hal yang diperhitungkan dalam membuat kebijakan luar negeri. Faktor-faktor seperti nilai, arah, dan sikap suatu negara tercermin dalam kebijakan yang dihasilkannya. Serta kepentingan nasional setiap negara merupakan hal utama yang membuat kebijakan setiap negara berbeda karena masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing.

Sebagai negara yang sudah merdeka Indonesia juga jadi tertarik dalam dunia internasional. Indonesia tentu perlu memperjelas posisinya dalam sistem tersebut. Berdasarkan pembukaan UUD 1945, Indonesia akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan begitu posisi dan status Indonesia harus jelas dalam percaturan internasional. Maka dari itu munculah politik luar negeri pemerintah yang dikenal dengan nama “Politik Bebas-Aktif”.

Politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas-aktif ini dikemukakan secara tidak langsung pertama kali oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu Mohammad Hatta ketika memimpin Kabinet Presidensiil pada tanggal 2 September 1948. Beliau mengatakan “... Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”.

Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja S.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini” menjelaskan tentang corak politik bebas aktif sebagai berikut: “Bebas: dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada

dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif: berarti bahwa dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif itu, Indonesia mendudukkan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai obyek, Sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan nasional negara lain itu sendiri”¹².

B. Hubungan Indonesia dan Timur Tengah

Kedekatan Indonesia terhadap negara-negara Timur Tengah sudah terjalin sejak lama. Banyak faktor yang membuat kedekatan yang terjalin antara Indonesia dengan negara-negara kawasan di Timur Tengah. Indonesia aktif dalam memperjuangkan hak-hak umat muslim di kawasan Timur Tengah. Salah satu keterlibatan Indonesia di kawasan Timur Tengah ialah konflik antara Palestina – Israel. Dalam konflik tentunya Indonesia termasuk sebagai negara yang ikut mendukung kemerdekaan untuk Palestina. Sikap pro yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap dukungan kemerdekaan Palestina telah lama dilakukan bahkan semenjak awal kemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan Presiden pertama Indonesia Soekarno yang menyatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Berdasarkan pernyataan Soekarno tersebut hingga saat ini Indonesia masih dan selalu mendukung bangsa Palestina.

Selain konflik antara Israel – Palestina, ada banyak lagi dukungan serta bantuan Indonesia dalam konflik-konflik yang

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaannya dewasa ini*, Alumni, Bandung, 1983

terjadi di kawasan Timur Tengah. Seperti konflik yang terjadi di Suriah, Libanon, Yaman, dan kawasan lainnya. Bantuan yang Indonesia berikan terhadap daerah-daerah tersebut meliputi berbagai aspek, baik dukungan dalam mengajak negara-negara di dunia untuk memberi perhatian dan bantuan, bantuan ekonomi hingga bantuan kemanusiaan. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menjalankan politik luar negerinya yang bebas-aktif, dengan menunjukkan aktifnya peran Indonesia dalam membantu meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Selain itu Indonesia juga banyak menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, seperti Mesir, Arab Saudi, Iran dan sekitarnya. Berikut akan menjelaskan bagaimana hubungan Indonesia dengan beberapa negara di Kawasan Timur Tengah.

a. Hubungan Bilateral Indonesia – Arab Saudi

Sejarah hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi sudah berlangsung sejak lama. Arab Saudi merupakan salah satu dari negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Secara resmi hubungan kedua negara ini telah terjalin sejak tahun 1947. Saat itu Raja Abdul Aziz Al-Saud memberikan Surat Pengakuan Kerajaan Saudi Arabia kepada pemerintah RI pada 21 November 1947.

Pada 1950, Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang terakreditasi untuk Pakistan, Arab dan Iran di Kairo, Mesir. Hal tersebut secara resmi membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1955, Arab Saudi membuka Kedutaan besar (Kedubes) di Jakarta, Indonesia. Dan di tahun 1964 KBRI didirikan di Jeddah, Arab Saudi, yang terakreditasi khusus untuk bilateral Indonesia dan Arab Saudi. Sedangkan kantor Konsulat Jendral Republik

Indonesia untuk Arab Saudi baru didirikan pada tahun 2003 di Dubai, Arab Saudi.

Sebagai negara yang termasuk dalam G-20 Indonesia dan Arab Saudi memiliki banyak potensi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk saling bekerjasama. Saat ini Arab Saudi memiliki visi pada tahun 2030 dengan melakukan diversifikasi sumber-sumber investasi, termasuk melepas 5 persen saham Aramco. Indonesia menjadi salah satu tujuan bagi Arab Saudi karena pertumbuhan ekonominya yang stabil dan juga keadaan politiknya.

Indonesia dan Arab Saudi juga telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Seperti di bidang pembangunan kelautan dan perikanan; keamanan pangan dan karantina ikan; promosi dan pemasaran produk perikanan; pengelolaan dan konservasi sumber daya laut pesisir; pengetahuan dan penelitian terapan serta pelatihan teknis modern; pertukaran informasi dan pengalaman sebagai tambahan untuk pelatihan teknis modern.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan KKP, saat ini Indonesia menempati posisi kedua eskportir tuna kaleng ke Arab Saudi setelah Thailand. Selama ini bahan baku tuna kaleng Thailand berasal dari Indonesia, namun semenjak 2015 volume ekspor bahan baku tuna Indonesia turun drastis dikarenakan pemerintah Indonesia melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Pada 2016, ekspor Indonesia ke Arab Saudi mencapai US\$66.849.893 atau senilai Rp869 Miliar dengan komoditas yang diekspor adalah cakalang, tuna, makarel dan produk ikan lainnya. Sedangkan untuk impornya berupa ikan makarel senilai US\$645.083 atau setara dengan Rp8 miliar. Dari kegiatan tersebut, tercapai surplus US\$66.204.810 atau setara dengan Rp860 Miliar.

Selain itu Arab Saudi juga menandatangani proyek refinery Development Masterplan Program (RDMP) Cilacap antara Pertamina dan Saudi Arabian Oil Company (Aramco) senilai US\$ 6 miliar. Program tersebut merupakan penambahan kapasitas dan kompleksitas kilang minyak di Cilacap. Program ini ditandatangani oleh pihak Arab Saudi ketika kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud pada bulan maret 2017.¹³ Proyek kilang minyak (refinery) ini merupakan program yang menjadi nilai investasi yang paling tinggi di Indonesia. Dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak dalam proyek ini diharapkan kerjasama antara kedua negara mendorong basic engineering design dan segera mewujudkan pembentukan usaha patungan (*joint venture*).

Selain itu Indonesia juga memiliki nilai ekspor yang tinggi terhadap Arab Saudi dalam bidang rempah-rempah seperti kayumanis, cengkeh, dan kapulaga. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, pertumbuhan ekspor rempah-rempah Indonesia ke Arab Saudi tumbuh 51.17%.¹⁴ Pertumbuhan tersebut terjadi karena kedatangan jamaah haji dan umroh ke Arab Saudi yang besar setiap tahunnya sehingga membuat Arab Saudi harus mencukupi kebutuhan jamaah tersebut sebagai tugasnya.

Hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia juga meliputi sektor pendidikan dan kebudayaan. Terutama

¹³ Nababan, "Pertamina-Saudi Aramco Tandatangani Kerja Sama Proyek US\$6 M", 2017, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170302102927-85-197238/pertamina-saudi-aramco-tandatangani-kerja-sama-proyek-us-6-m?>

¹⁴ Kemendag Indonesia, "Pertumbuhan Ekspor Rempah ke Arab Saudi 51,17%", diakses dari <http://www.kemendag.go.id/id/news/2017/02/03/pertumbuhan-ekspor-rempah-ke-arab-saudi-5117>

dalam bidang pendidikan, Arab Saudi sudah memberikan fasilitas pendidikan bagi pemuda Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Arab Saudi dengan memberikan beasiswa. Beasiswa yang disediakan Arab Saudi mencapai 250 pelajar setiap tahun yang direalisasikan melalui Universitas Islam Imam Mohammed bin Saud.

Saat ini kualitas pendidikan di Arab Saudi mulai diakui dunia internasional, beberapa kampusnya masuk top five hundred world class university. Ketika kunjungan Raja Salman ke Indonesia menambah kesepakatan baru yaitu lebih meningkatkan pendidikan ilmu bahasa arab dan ilmu Islam di universitas-universitas Indonesia. Hal tersebut merupakan sesuatu yang memiliki hal positif karena Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, namun penguasaan bahasa arab yang merupakan bagian penting dari umat Islam masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu menguasainya.¹⁵

Pada bidang kebudayaan Indonesia dan Arab Saudi mengadakan pertukaran pertukaran grup musik, musik daerah, dan kelompok teater. Selain itu juga diadakan pameran lukisan kartun dan pertukaran pertunjukan teater anak-anak pada program-program khusus kebudayaan yang diselenggarakan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Kerjasama dalam bidang ini diharapkan mampu lebih mengenalkan dan juga secara emosional membuat masyarakat memiliki wawasan tentang Arab Saudi.¹⁶

¹⁵ Krisiandi, *“RI-Saudi Kerja Sama Bidang Pendidikan Bahasa Arab dan Ilmu Islam”*, 2017, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/13/14574791/ri-saudi.kerja.sama.bidang.pendidikan.bahasa.arab.dan.ilmu.islam>,

¹⁶ Kemendikbud Indonesia, *“Kerja Sama Kebudayaan Indonesia – Arab Saudi Perkuat Hubungan Baik Pemerintah dan Masyarakat”*, 2017, diakses dari

Indonesia sering kali diberikan kesempatan oleh pihak pemerintah Arab Saudi untuk memperlihatkan khas kebudayaan tanah air. Pada awal tahun ini dalam acara ajang pameran pariwisata Jeddah International Travel & Tourism Exhibition (JTTX7) yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Pameran ini diikuti lebih dari 160 peserta dari 20 negara dan dihadiri lebih dari 25.000 pengunjung dari seluruh dunia.

Indonesia untuk kedua kalinya menjadi peserta kehormatan (guest of honour) pada acara ini dengan kehadiran dari Konsul Jenderal RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin. Dalam kesempatan tersebut pihak Indonesia menayangkan kesenian tari Glipang dari Madura Jawa Timur yang penarinya berasal dari tanah air.

b. Hubungan Bilateral Indonesia – Iran

Indonesia dan Iran merupakan dua negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Meskipun dalam pemahamannya ada perbedaan, yaitu mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penganut aliran Sunni sedangkan Iran menganut aliran Syiah. Perbedaan pemahaman tersebut tentunya memiliki pengaruh tersendiri bagi hubungan kedua negara. Namun kerjasama yang terjalin selalu diusahakan untuk terus maju dan berkembang oleh kedua belah pihak.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran telah dimulai sejak tahun 1950. Indonesia mendirikan kedutaan di Tehran, dan Iran juga mendirikan kedutaan besar di Jakarta. Sebelumnya Indonesia dan Iran juga telah menjalin hubungan jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/03/kerja-sama-kebudayaan-indonesia--arab-saudi-perkuat-hubungan-baik-pemerintah-dan-masyarakat>

tersebut dapat dilihat dari jejak bukti-bukti pengaruh dan peninggalan Iran sewaktu masih menjadi kerajaan Persia di Indonesia.

Awal mula terjadinya hubungan antara Indonesia dan Iran berasal dari perdagangan. Hubungan perdagangan ini telah terjalin sejak 7M yaitu ketika Indonesia masih dalam era kerajaan. Saat itu kerajaan yang menjalin perdagangan dengan kerajaan Persia ialah kerajaan Sriwijaya yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan kehadiran pedagang Persia di Nusantara di antaranya penemuan artefak dari gelas dan kaca berbentuk vas, botol dan jambangan.

Sejarah panjang hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran tersebut sempat dirayakan oleh Indonesia di Teheran, Iran. Pada tahun 2013 lalu Indonesia menggunakan tema “Peringatan 1.000 Tahun Hubungan Indonesia – Iran”. Pada acara tersebut juga diisi dengan pentas seni, pameran, dan seminar. Pada pameran tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Mohammad Nuh, serta Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran, Ali Janati.¹⁷

Hingga saat ini hubungan yang terjalin oleh kedua semakin intensif. Hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh kedua pihak. Pada era presiden SBY tahun 2006 Dr. Mahmoud Ahmadinejad dan rombongan akan melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada. Kemudian pada tahun 2008 Presiden RI saat itu Sulsilo Bambang Yudhoyono membalas kunjungan tersebut. Kemudian pada tahun 2015, sebanyak 10

¹⁷ Nazar Nurdin, “Perayaan 1.000 Tahun Hubungan Indonesia - Iran”, diakses dari

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13285130/perayaan-1000-tahun-hubungan-indonesia-iran?page=all>

kunjungan pejabat tingkat Menteri telah dilakukan oleh kedua negara utamanya kunjungan Menlu RI, Menlu Iran, Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menristek RI, Menristek Iran, Menteri Pemuda dan Olahraga RI dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pada era Jokowi, Indonesia mengunjungi Iran pada tahun 2016 saat itu presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Kunjungan tersebut merupakan balasan dari kunjungan presiden Iran Hassan Rouhani pada bulan April 2015.¹⁸

Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa kedua negara tetap saling menjaga hubungan baik. Meskipun masing-masing presiden negara telah berganti sekian kali kunjungan tetap dilakukan. Kunjungan kenegaraan tersebut banyak menghasilkan kerjasama oleh kedua negara. Berbagai aspek kerjasama dilakukan oleh kedua negara sebagai bentuk dari perkembangan yang baik dalam hubungan bilateral tersebut.

Kedekatan hubungan antara Indonesia dan Iran juga tentu membawa pengaruh dalam peningkatan kerjasama antara kedua negara tersebut. Berbagai sektor kerjasama telah dijalin oleh kedua belah pihak. Mulai dari sektor ekonomi, budaya, pendidikan, hingga pertahanan. Kunjungan yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin negara menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Iran semakin membaik setiap tahunnya.

¹⁸ Kemenlu Indonesia, "*Presiden Jokowi Mendarat di Bandar Udara Mehrabad, Iran*", diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/presiden-jokowi-bandara-mehrabad-iran.aspx>

Kerjasama dalam sektor ekonomi yang telah dilakukan memberikan efek positif dalam hubungan kedua negara. Dalam kerjasama tersebut Iran membutuhkan hasil pertanian dan perkebunan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kertas dan produk kertas, bahan baku tekstil, ban, karet, bubuk coklat, biji kopi, karton dan produk kayu. Sedangkan Iran mengeksport besi baja setengah jadi, aluminium, LPG, etilen, propilen, karpet dan gilin, lampu kerajinan tangan, dan kacang-kacangan ke Indonesia.

Salah satu produk dengan jumlah besar diimpor dari Iran ialah LPG. Sudirman Said yang saat itu merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia melakukan kunjungan kerja dalam rangka merealisasikan kerja sama di bidang minyak dan gas bumi (migas) pada tahun 2015 di Teheran, Iran.¹⁹ Dalam pertemuan ini menyepakati tujuh kerja sama di bidang migas yang mencakup antara lain: kerja sama hulu migas di Iran, perdagangan produk migas, proyek gas, pengolahan minyak, petrokimia, industri penunjang migas, hingga peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang migas.

Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak urutan ke 4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 255,461,700 jiwa. Tentunya dengan jumlah penduduk tersebut kebutuhan negara akan semakin meningkat. Saat ini, kebutuhan LPG Indonesia telah mencapai 6 juta ton/tahun. Indonesia telah mengimpor LPG 3 juta ton/tahun setengah dari kebutuhan tersebut dan terus meningkat. Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya oleh Menteri ESDM dan Kementrian

¹⁹ Victor Maulana, "*Menteri ESDM Beberkan Poin Penting Kerja Sama LPG RI-Iran*", diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1112937/34/menteri-esdm-beberkan-poin-penting-kerja-sama-lpg-ri-iran-1464702580>

Perminyakan Iran Indonesia mengimpor sebanyak 88.000 ton LPG jangka pendek untuk 2016. Kemudian pada tahun 2017 ini direncanakan akan mengimpor sebesar kurang lebih 500 ribu metrik ton LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

c. Hubungan Bilateral Indonesia – Mesir

Indonesia dan Mesir memiliki sejarah hubungan bilateral yang panjang terhitung dari masa awal kemerdekaan Indonesia hingga kini. Mesir merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946. Kurang dari setahun kemudian, tepatnya pada 10 Juni 1947, secara resmi kedua negara membuka hubungan diplomatik melalui penandatanganan Perjanjian Persahabatan (*Treaty of Friendship and Cordiality*), yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan RI di Cairo pada 1949.²⁰

Pengakuan yang diberikan oleh Mesir tersebut merupakan bentuk dukungan dan terhadap Indonesia karena kedekatan yang telah terjalin sejak lama. Sejak abad ke-19 banyak mahasiswa datang ke Mesir untuk menuntut ilmu khususnya ilmu agama Islam di Universitas Al-Azhar. Saat sebelum masa kemerdekaan Indonesia, mahasiswa-mahasiswa disana telah melakukan aksi tentang keinginan dan usaha Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya melalui lisan, tulisan dan seminar-seminar. Keinginan para mahasiswa untuk merdeka dari penjajahan ini disambut baik oleh Raja Mesir kala itu, Raja Faruq. Beliau juga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan Indonesia, terutama karena masyarakat Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim.

²⁰ KBRI Kairo, “*Sejarah Hubungan Indonesia Mesir*”, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/Cairo/id//Pages/Mesir.aspx>

Upaya dari para mahasiswa dan pelajar ini mulai memberikan hasil. Pada tanggal 23 Maret 1946 pemerintah Mesir menganggap warga Indonesia di Mesir tidak lagi ada hubungan dengan Belanda, dan dalam segala hal yang berhubungan dengan dengan mereka, pemerintah Mesir hanya akan membantu dan berhubungan dengan Indonesia. Bahkan beberapa politisi di Mesir dan politisi Arab lainnya membentuk Panitia Pembela Indonesia. Panitia ini diketuai oleh Saleh Harb Pasya, mantan menteri pertahanan Mesir.

Indonesia dan Mesir tetap terus menjaga dengan baik hubungan bilateralnya. Hal tersebut dapat dilihat kunjungan kenegaraan dari masing-masing kepala negara atau menteri yang dilakukan untuk saling memperkuat kedekatan yang telah terjalin. Setiap Presiden Indonesia telah melakukan kunjungan ke negara piramida tersebut, kecuali B.J Habiebie.

Sebagai bentuk balasan Presiden Mesir Hosni Mubarak pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1983. Pada tahun 2015 yang lalu Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah al-Sisi melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Kunjungan kerja ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam perdagangan dan investi. Selain itu juga akan mendiskusikan tentang dunia Islam saat ini.²¹

Sejarah panjang hubungan baik antara Indonesia dan Mesir tidak hanya terjalin dalam bidang politik saja. Kedua negara ini juga melakukan kegiatan ekspor-impor guna mencukupi kebutuhan dalam negerinya masing-masing. Pada tahun 2016 jumlah nilai perdagangan antara

²¹ Setkab Indonesia, "*Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Presiden Mesir Al Sisi Dengan Upacara Kenegaraan*", diakses dari <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sambut-kunjungan-presiden-mesir-al-sisi-dengan-upacara-kenegaraan/>

Indonesia – Mesir mencapai USD 1,232 miliar. Jumlah tersebut dapat dikatakan stabil karena pada tahun-tahun sebelumnya antara tahun 2013 sampai 2015 rata-rata jumlah nilai perdagangan yaitu USD 1.3 miliar.

Berikut adalah tabel terbaru dari neraca perdagangan antara Indonesia – Mesir dari tahun 2011-2018:

Tabel 2.1

Neraca Perdagangan Indonesia Mesir (2013-2017)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Trend (%) 2013- 2017	Jan-Jan		Perub. (%) 2018/ 2017
							2017	2018	
TOTAL PERDAGANGAN	1.228.656,4	1.486.936,1	1.441.000,8	1.462.581,4	1.505.981,3	3,98	139.586,3	71.625,3	-48,69
MIGAS	3,0	0,0	159.162,0	257.552,1	138.483,3	0,00	8,6	2,9	-67,04
NON MIGAS	1.228.653,4	1.486.936,1	1.281.838,9	1.205.029,3	1.367.498,0	0,04	139.577,7	71.622,5	-48,69
EKSPOR	1.101.772,8	1.341.002,2	1.197.912,5	1.110.437,9	1.253.623,6	0,70	131.580,1	55.716,5	-57,66
MIGAS	0,0	0,0	26.229,3	1,6	2.554,6	0,00	0,0	0,0	0,00
NON MIGAS	1.101.772,8	1.341.002,2	1.171.683,2	1.110.436,3	1.251.069,0	0,66	131.580,1	55.716,5	-57,66
IMPOR	126.883,5	145.933,9	243.088,3	352.143,5	252.357,7	25,31	8.006,2	15.908,8	98,71
MIGAS	3,0	0,0	132.932,7	257.550,5	135.928,7	0,00	8,6	2,9	-67,04
NON MIGAS	126.880,6	145.933,9	110.155,6	94.593,1	116.429,0	-5,88	7.997,5	15.905,9	98,89
NERACA PERDAGANGAN	974.889,3	1.195.068,3	954.824,1	758.294,4	1.001.265,9	-3,94	123.573,9	39.807,8	-67,79

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Tren d(%) 2013- 2017	Jan-Jan		Perub .(%) 2018/ 2017
							2017	2018	
MIGAS	-3,0	0,0	- 106.70 3,4	- 257.54 8,8	- 133.37 4,1	0,00	-8,6	-2,9	67,04
NON MIGAS	974.89 2,3	1.195. 068,3	1.061. 527,6	1.015. 843,2	1.134. 640,1	1,42	123.5 82,6	39.8 10,6	-67,79

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade

Indonesia termasuk sebagai negara impor utama bagi Mesir. Pada tahun 2016 nilai ekspor Indonesia ke Mesir mencapai USD 895 juta, meskipun jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya dengan total USD 1.2 miliar. Indonesia mengeksport produk yang meliputi *palm oil*, produk kertas, kertas tisu toilet, produk perawatan bayi, perawatan kulit, sabun kecantikan, sampo, pasta gigi, kosmetik herbal, bahan makanan, barang pecah belah, plastik, kerajinan tangan, kendaraan roda empat, produk kelapa, palm kernel, dan produk perikanan. Sedangkan Indonesia mengimpor produk berupa kalsium & aluminium fosfat, kapur alami & kapur fosfat, kurma, buah ara, nanas, mangga, alpukat, jambu biji, ekstraksi atau pemurnian gula, kentang, bit-pulp, ampas tebu dan pembuatan bir atau penyulingan ampas dan limbah, buah jeruk segar atau kering, aspal, mineral atau pupuk kimia, biji adas manis, adas, ketumbar, jinten, kapas, karpet, produk tekstil, karbon aktif; produk mineral alam, konsentrat kopi dari Mesir.²²

C. Kebijakan Indonesia Di Timur Tengah Melalui Organisasi Internasional

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1969. Hingga

²² Kemenlu Indonesia, "Sejarah Hubungan Indonesia Mesir", diakses dari <https://www.kemlu.go.id/cairo/id/Pages/Mesir.aspx>

saat ini OKI memiliki 57 negara di dunia, 47 negaranya merupakan negara dengan mayoritas muslim termasuk Indonesia. Bahasa resmi yang digunakan OKI adalah tiga bahasa yaitu Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Prancis. Kantor pusat OKI berada di Jeddah, Arab Saudi. Saat ini pemimpin OKI adalah Yousef Al-Othaimeen.

Organisasi ini berguna untuk mengumpulkan suara umat muslim di dunia serta melindungi dan menjaga kepentingan umat muslim di dunia dengan semangat untuk menyebarkan keadamaian. Berdasarkan piagam OKI tujuan dari berdirinya OKI ialah untuk mempertahankan nilai sosial dan ekonomi Islam, menguatkan solidaritas terhadap sesama anggota, meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmiah, dan politik, menegakkan keadamaian dan keamanan dunia internasional, dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia merupakan negara yang termasuk anggota awal saat berdirinya OKI. Meskipun saat awal berdirinya peran Indonesia tidak begitu berpengaruh, namun ketika presiden Soeharto untuk pertama kalinya hadir dalam KTT ke-6 OKI yang diselenggarakan di Senegal, Desember 1991 langkah ini merupakan awal perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif di OKI, meskipun peran Indonesia di OKI tidak terlalu dominan sebagaimana perannya di forum kerjasama multilateral seperti ASEAN dan GNB (Gerakan Non Blok).

Beberapa peran aktif Indonesia di OKI yang menonjol adalah ketika pada tahun 1993 Indonesia menerima mandat sebagai ketua *Committee of Six*, yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara *Moro National Liberation Front* (MNLF) dengan pemerintah Filipina. Kemudian pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM-OKI) ke-24 di Jakarta. Selain itu, Indonesia

juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Pada penyelenggaraan KTT OKI ke-14 di Dakar Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC's *Ten-Year Plan of Action*.²³ Dengan diadopsinya piagam ini, Indonesia memiliki ruang untuk lebih berperan dalam memastikan implementasi reformasi OKI tersebut. Indonesia berkomitmen dalam menjamin kebebasan, toleransi dan harmonisasi serta memberikan bukti nyata akan keselarasan Islam, demokrasi dan modernitas.

Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki pengaruh besar di OKI. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia, serta keragaman penduduk yang ada di Indonesia mampu menunjukkan bahwa kedamaian dapat dicapai melalui mediasi tanpa jalur kekerasan. Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara di Timur Tengah, sehingga Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang mampu mengambil keputusan adil pada suatu konflik yang terjadi. Sejak awal bergabung Indonesia juga selalu mendukung kemerdekaan bagi Palestina dengan Yerusslam sebagai ibu kotanya.²⁴

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik, yaitu pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina

²³ Muhammad Fakhry Ghafur, "*Revitalisasi Peran Indonesia di Organisasi Konferensi Islam (OKI)*", diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/443-revitalisasi-peran-indonesia-di-organisasi-konferensi-islam-oki>

²⁴ Ghafur, "*Revitalisasi Peran Indonesia di Organisasi Konferensi Islam (OKI)*", diakses dari Pusat Penelitian Politik: <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/443-revitalisasi-peran-indonesia-di-organisasi-konferensi-islam-oki.html>,

(Palestinian National Council) untuk memproklamasikan Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988. Dukungan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Di samping itu, Indonesia adalah anggota Committee on Al-Quds (Yerusalem) yang dibentuk pada tahun 1975.

Terkait dengan pernyataan Amerika yang ingin memindahkan kedutaan besar untuk Israel yang sebelumnya berada di Tel Aviv ke Yerusalem menuai banyak protes terutama dari Palestina dan negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara anggota OKI. Pernyataan dari Trump ini telah melanggar konsensus internasional atas Yerusalem, dunia internasional selama ini menganggap Yerusalem adalah wilayah yang harusnya berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (*separated body*). Sikap ini diambil PBB, dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947. Resolusi ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka.

Pada saat KTT OKI dilaksanakan pada bulan Desember 2017 di Turki lalu, Indonesia melalui Presiden Jokowi menyampaikan enam poin usulan sikap negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Poin-poin usulan tersebut sebagai berikut;

1. OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral (AS) tersebut. Two state solution merupakan satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
2. Presiden Jokowi mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak

mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkannya ke Yerusalem.

3. OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melaksanakannya.

4. Menyerukan sejumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan diplomatik tersebut.

5. Anggota OKI harus mengambil langkah bersama dalam hal meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas, dan kerjasama ekonomi terhadap Palestina.

6. Indonesia berharap OKI menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina. Hal itu termasuk di Majelis Umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Poin-poin yang disampaikan oleh Jokowi di KTT tersebut disetujui oleh semua anggota yang hadir, dan semuanya menentang sikap Amerika Serikat dan sepakat untuk tidak mengikuti langkah tersebut. Selain itu Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya Retno Marsudi pergi mengunjungi negara-negara yang ada di Eropa. Usaha tersebut dilakukan untuk mengajak Uni Eropa tidak mengikuti langkah yang dilakukan Amerika Serikat, dan mendukung bahwa Yerusalem bukan merupakan ibu Kota Israel.